

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

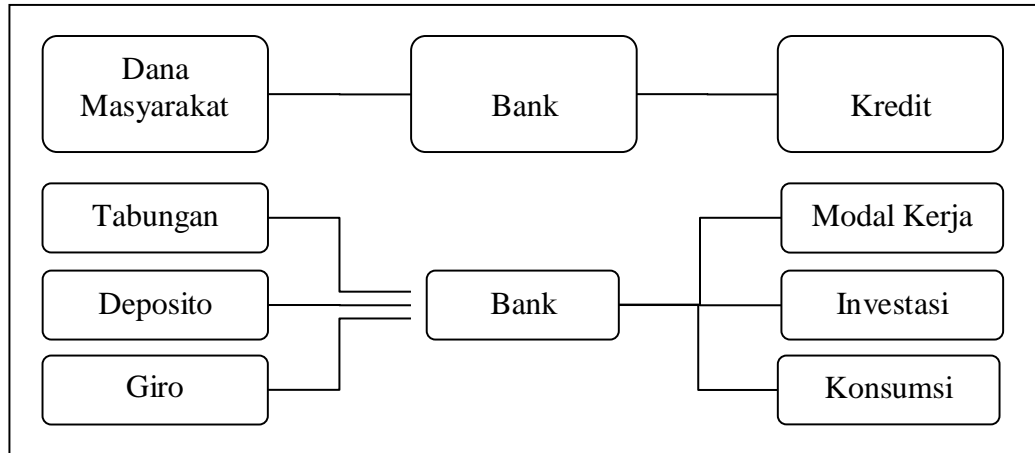
Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik.

Sipahutar (2007) menyatakan bahwa fungsi utama tersebut sangat penting dan jika fungsi ini tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka hampir dapat dipastikan bahwa masalah yang kompleks telah menanti kehidupan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan fungsi utama tersebut, kegiatan usaha bank pada dasarnya hanya dua, yaitu kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Judisseno (2002) menjelaskan bahwa bentuk kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank antara lain dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang pada prinsipnya adalah melakukan penyimpanan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian. Sedangkan bentuk kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana dapat berbentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa.

Gambar 1.1
Fungsi Utama Bank



Sumber: Judisseno (2002)

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Hal tersebut dapat dilihat pada Neraca dan Laporan Laba Rugi Bank. Di Neraca, besarnya Kredit yang Diberikan mendominasi daftar aktiva bank. Sedangkan di Laporan Laba Rugi, pendapatan dari Bunga Kredit dan Provisi Kredit mendominasi daftar pendapatan bank. Bagi bank umum, Bunga Kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber risiko operasi bisnis terbesar. Sebagian besar dana bank diputar dalam kredit, maka kredit mempunyai suatu kedudukan yang istimewa. Bagi bank umum, bila berhasil dalam kegiatan penyaluran kredit ini maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka terjerat dalam banyak kredit bermasalah atau macet (baik jumlah debitur maupun nilai pinjaman), mereka akan menghadapi masalah besar.

Kredit telah diatur di Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai balas jasa. Berdasarkan jenis penggunaannya kredit terbagi dalam beberapa macam, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Kredit investasi diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Kredit modal kerja diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, misalnya untuk membeli bahan baku. Kredit konsumsi biasanya dipergunakan membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif.

Penyaluran kredit, khususnya kredit produktif, diharapkan dapat menggerakkan kembali sektor riil sehingga tercipta kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Hal ini dapat berarti bahwa pertumbuhan ekonomi lebih efektif jika didorong oleh investasi sehingga sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada faktor stimulan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas kredit.

Tanggal 15 April 2008, Bank Indonesia menelurkan suatu paket kebijakan perbankan. Paket kebijakan ini akan memberikan kelonggaran bagi bank dalam meningkatkan penyaluran kreditnya. Deputi Gubernur BI, Muliawan D Hadad dalam jumpa pers di Gedung BI, Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa 15 April 2008 mengatakan paket kebijakan ini penting bagi perbankan di tengah berbagai tekanan yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini.

Paket kebijakan perbankan BI tersebut berisi aturan kredit yang dituangkan, yaitu:

1. Pelonggaran Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk kredit usaha kecil atau KUK untuk mendorong pinjaman perbankan kepada usaha kecil. "Meskipun demikian prinsip *prudential banking* tetap diperhatikan," ujar Muliaman D. Hadad.
2. Pelonggaran ATMR untuk obligasi korporasi yang dimiliki oleh bank. Pelonggaran ini dimaksudkan sebagai upaya BI untuk mendorong pasar modal dan juga pendalaman pasar finansial.
3. Peningkatan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada debitor yang bukan pihak terkait dengan bank.
4. Penyederhanaan prosedur pendirian kantor bank di bawah kantor cabang. Ini akan memberikan kemudahan bagi perbankan untuk memperluas jaringan agar bank bisa menyentuh area yang lebih besar cakupannya.
5. Peningkatan pengawasan, yaitu implementasi Basel II yang akan diterapkan Januari 2009 untuk bank-bank besar yang siap melakukannya.
6. Ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh BI. Ketika sebuah perusahaan mengeluarkan obligasi maka peringkatnya harus dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh BI.

Bank Indonesia melalui paket kebijakan ini mencoba untuk menegaskan fungsi utama bank sebagai *financial intermediary* dengan mendorong pertumbuhan kredit tanpa meninggalkan *prudential banking*.

Bank-bank milik pemerintah seharusnya menjadi pionir dalam memulihkan kembali fungsi intermediasi bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. Bank milik pemerintah diharapkan tidak hanya menerima dana masyarakat kemudian menyalurkannya ke pasar finansial, misalnya SBI dan

obligasi pemerintah untuk mendapatkan *margin* (keuntungan) tanpa harus bekerja keras dan tanpa perasaan bersalah melihat tidak bergairahnya sektor riil. Selain berorientasi profit, bank milik pemerintah juga berfungsi sebagai agen pembangunan nasional. Agen pembangunan yang dimiliki bank milik pemerintah tidak dapat dilakukan bank swasta.

Pemerintah yang mempunyai kendali terhadap bank-bank tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mendorong bank-bank tersebut menyalurkan kredit produktif. Jika saat ini bank-bank milik pemerintah masih terfokus pada kredit konsumsi, seharusnya pemerintah melalui BI membatasinya dan meminta bank tersebut meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif. Bahkan, jika perlu dengan peraturan atau kebijakan, tidak sekadar imbauan (*moral suasion*).

Rachmat (2003) menyimpulkan bahwa tingkat bunga kredit, tingkat bunga deposito, tingkat risiko kredit berpengaruh negatif terhadap keputusan bank berinvestasi dalam bentuk kredit, namun struktur modal, dan besarnya investasi periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap keputusan bank berinvestasi dalam bentuk kredit. Anggrahini (2004) menyatakan bahwa modal, dana pihak ketiga, tingkat suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan, namun pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka diajukan beberapa masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.:

1. Apakah tingkat suku bunga kredit Bank BCA cabang Sidoarjo sudah memadai?

2. Apakah tingkat kecukupan modal Bank BCA cabang Sidoarjo mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank BCA cabang Sidoarjo?
3. Apakah jumlah simpanan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank BCA cabang Sidoarjo?
4. Apakah jumlah kredit non lancar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank BCA Cabang Sidoarjo?
5. Apakah tingkat suku bunga kredit, tingkat kecukupan modal, jumlah simpanan masyarakat dan jumlah kredit non lancar secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada bank BCA cabang Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit Bank BCA di cabang Sidoarjo sudah memadai
2. Untuk mengetahui tingkat kecukupan modal Bank BCA di cabang Sidoarjo mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank BCA di cabang Sidoarjo
3. Untuk mengetahui jumlah simpanan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank BCA di cabang Sidoarjo
4. Untuk mengetahui jumlah kredit non lancar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank BCA di Cabang Sidoarjo

5. Untuk mengetahui tingkat suku bunga kredit, tingkat kecukupan modal, jumlah simpanan masyarakat dan jumlah kredit non lancar secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya penyaluran kredit pada bank BCA di Cabang Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penyusunan penelitian ini kiranya diharapkan sumbangan pemikiran yang mungkin baru dapat memberikan arah pemikiran ilmiah terhadap situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat dijadikan masukan bagi pembuatan analisis serta pengolahannya.

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi aspek akademis

Melalui penyusunan penelitian ini kiranya diharapkan sumbangan pemikiran yang mungkin baru dapat memberikan arah pemikiran ilmiah terhadap situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat dijadikan masukan bagi pembuatan analisis serta pengolahannya.

2. Bagi Aspek pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam analisis faktor-faktor dalam pemberian kredit pada suatu bank. .

3. Bagi aspek praktis.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses perkembangan perusahaan PT. BCA Cabang Sidoarjo.